



bab 1

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan sektor pariwisata di Indonesia dewasa ini diupayakan agar dapat menjadi salah satu sektor yang dapat memberikan andil besar dalam pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat daerah sektor ini diperkirakan akan menjadi penunjang pendapatan daerah yang kontribusinya di masa depan semakin besar karena memiliki prospek yang menguntungkan. Sektor pariwisata juga diharapkan dapat mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi setelah terjadinya krisis multidimensional yang telah melanda Indonesia belakangan ini. Harapan ini tidaklah berlebihan mengingat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi serta kekayaan sumberdaya alam yang sangat besar. Kekayaan alam tersebut tersebar mulai dari perairan, daratan sampai kepegunungan yang didalamnya terkandung berbagai potensi flora dan fauna yang sangat beranekaragam serta sejarah yang menarik untuk dinapaktilasi para turis domestik lokal dan nasional bahkan turis mancanegara.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, pembangunan pariwisata di daerah sudah saatnya dipersiapkan secara lebih terstruktur, terpadu dan berkesinambungan. Dalam rangka otonomi daerah, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi yang melibatkan berbagai sektor dan stakeholder. Kenyataan ini ditunjukkan oleh makin luasnya kegiatan masyarakat yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pariwisata dan juga ditunjukkan oleh berkembangnya berbagai program yang dilaksanakan pemerintah dalam mendorong kegiatan industri pariwisata.

Kebijakan-kebijakan publik pada era reformasi mengharuskan adanya perubahan-perubahan besar yang terutama dimaksudkan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik (*good governance*) dan diterapkannya administrasi pembangunan secara terdesentralisasi. Hal ini sangat diperlukan sekaligus untuk mengkomodasikan penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.



Ada dua keputusan politik penting yang harus dijalankan sebagai bagian dari kebijakan reformasi pembangunan. Pertama adalah untuk menanggulangi krisis di bidang ekonomi yang antara lain dilaksanakan melalui upaya pendayagunaan potensi kepariwisataan yang kedua adalah untuk mendukung agenda yang pertama tersebut yaitu munculnya kemauan politik otonomi daerah yang berarti bahwa peran Pemerintah Daerah semakin penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bersama masyarakat.

Semakin pentingnya sektor pariwisata bagi banyak negara di dunia menyebabkan munculnya persaingan yang semakin ketat dalam menjual produk pariwisata. Karena itu daerah-daerah tujuan wisata harus lebih mengembangkan produk dan atraksi wisata yang unik di daerah. Selain itu, tanpa adanya ketersediaan produk seperti potensi obyek/daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung lainnya seperti listrik, air, sarana komunikasi, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan dan dukungan lingkungan (fisik dan sosial budaya) yang sesuai dengan pasar, maka aktivitas dan pembangunan pariwisata tidak dapat berjalan secara optimal.

Mengingat pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu upaya pemerataan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka potensi kepariwisataan di Kabupaten Padang Lawas harus dibina dan dikembangkan secara optimal, terarah dan terpadu sesuai dengan kebijaksanaan nasional dan daerah. Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam pola dasar pembangunan Kabupaten Padang Lawas :

- a. Mendayagunakan pariwisata sebagai salah satu potensi ekonomi daerah.
- b. Mengembangkan pariwisata melalui penataan obyek wisata baik wisata alam buatan maupun wisata budaya dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan rasa cinta alam dan lingkungan hidup yang lebih kuat agar tersirat nilai karakter daerah agamais, historis dan patriotis.
- d. Memanfaatkan kawasan pariwisata terpadu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya dan
- e. Meningkatkan publikasi dan pelayanan kepariwisataan baik kepada wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agamais, historis dan patriotis.



Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi kepariwisataan yang relatif besar yang terdiri atas wisata alam (ekowisata), wisata budaya, wisata sejarah (situs peninggalan purbakala), agrowisata, dan sebagainya. Kepariwisataan di Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu sektor ekonomi yang bisa menjadi prioritas utama dan mendesak perlu ditangani. Dampaknya akan segera terlihat apabila sektor tersebut segera ditangani karena kepariwisataan di Kabupaten Padang Lawas merupakan sektor yang diperkirakan mampu menjadi pendorong bagi pembangunan sektor lainnya.

Berdasarkan hal di atas diperlukan suatu perencanaan pembangunan pariwisata yang komprehensif, saling berkaitan antar sektor, antar wilayah dan antar potensi yang berkaitan dengan pariwisata. Permasalahan yang kemudian muncul adalah upaya apa yang harus dilakukan untuk merencanakan dan membangun pariwisata dan bagaimana mewujudkannya. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan suatu studi penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Padang Lawas yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan mengembangkan sektor pariwisata secara terstruktur, terpadu dan memiliki wawasan yang berkesinambungan.

1.2. DASAR ACUAN PELAKSANAAN

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Padang Lawas termasuk yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan ini, mengacu pada berbagai produk peraturan yang ada, yang mengatur tentang kepariwisataan, lingkungan, tata ruang, pembangunan masyarakat dan lainnya, antara lain :

- Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754).
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.



- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33).
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005 – 2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038.

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Padang Lawas ini dimaksudkan untuk menghasilkan konsep pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Padang Lawas yang aktual, komprehensif dan responsif terhadap berbagai perubahan yang ada.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Padang Lawas, meliputi :



- a. Menginventarisir obyek dan daya tarik wisata (ODTW)
- b. Mengkaji pembangunan strategis ODTW yang telah ditentukan baik dari aspek penataan ruang, sosial ekonomi dan budaya serta pedoman dan analisa kelayakan sektor serta manajemen pengelolaan.
- c. Memberi rekomendasi terhadap usaha-usaha pembangunan ODTW di Kabupaten Padang Lawas.
- d. Menyusun Rencana Strategis untuk ODTW terpilih
- e. Memberi kepastian hukum terhadap perencanaan kepariwisataan

1.3.3. Manfaat

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Padang Lawas ini berguna untuk memberi pedoman pembangunan pariwisata sehingga sumbangan aktor pariwisata terhadap pendapatan daerah akan terus berkembang melalui pertumbuhan (*growth*) pemerataan (*equity*) dan keberlanjutan / *sustainability* yang dicapai melalui upaya-upaya pelestarian, pembangunan dan pemanfaatan yang saling berkaitan dan berkesinambungan.

1.4. KELUARAN KEGIATAN PENYUSUNAN RIPPARKAB

Keluaran kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Padang Lawas adalah :

- a. Data dan analisis produk serta pasar pariwisata yang meliputi ODTW, kelembagaan, lingkungan, aksesibilitas, pemasaran dan investasi
- b. Visi dan misi pembangunan pariwisata
- c. Konsep dan strategi pembangunan pariwisata
- d. Arahan pembangunan pariwisata meliputi penataan ruang, pembangunan ODTW, SDM dan kelembagaan lingkungan, aksesibilitas, sosial ekonomi, budaya dan permasalahan pariwisata
- e. Program dan aktivitas pembangunan pariwisata
- f. Rencana strategis untuk ODTW terpilih
- g. Rancangan Perda RIPPARKAB Padang Lawas



1.5. LINGKUP PEKERJAAN PENYUSUNAN RIPPARKAB

1.5.1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Penyusunan RIPPARKAB Padang Lawas ini meliputi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan survey / pengumpulan data, pengelompokan dan analisis data, perumusan RIPPARKAB serta penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan.
- b. Identifikasi pasar wisatawan, kecenderungan, pergerakan, orientasi pasar serta pelaku pariwisata yang berkenaan dengan obyek dan daya tarik wisata.
- c. Identifikasi pola pembangunan di daerah dan mengkaji pola pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.
- d. Identifikasi program dukungan sektoral yang terkait dengan pembangunan pariwisata.
- e. Perencanaan dan perancangan yang melibatkan partisipasi masyarakat, meliputi zoning, rencana tata ruang, rencana penghijauan dan rencana sistem transportasi.
- f. Penyusunan program pembangunan dan investasi.
- g. Penyusunan implemantasi dan rencana pertahapan pembangunan.
- h. Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Padang Lawas.

1.5.2. Lingkup Wilayah

Secara teritorial, studi ini akan mempunyai lingkup dan cakupan sebagai berikut :

- a. Wilayah pengamatan umum yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas.
- b. Wilayah pengamatan semi intensif yang meliputi obyek dan daya tarik wisata terpilih.

1.5.3. Lingkup Waktu

Sesuai arahan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 produk Penyusunan RIPPARKAB Padang Lawas tahun 2019 diperkirakan dapat diimplementasikan dan relevan untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan. Akhir tahun implementasi perencanaan disesuaikan dengan akhir tahun implementasi perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas yaitu tahun 2025.



1.6. METODOLOGI PENYUSUNAN RIPPARKAB

1.6.1. Pendekatan Umum

Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas dapat dibagi atas beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, survey/pengumpulan data, pengelompokan dan pengolahan data, perumusan rencana pengembangan pariwisata daerah, serta penyusunan Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah.

Analisis terhadap pasar produk wisata merupakan langkah awal yang akan dilakukan. Oleh karena itu studi ini akan meninjau pasar pariwisata daerah lebih tajam. Analisis produk dan pasar ini akan memberikan landasan bagi terwujudnya rencana fisik pengembangan kawasan serta berbagai kriteria perencanaan yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan kawasan. Upaya ini akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti :

- Kebutuhan fasilitas dan lahan,
- Kesesuaian dengan rencana pengembangan spasial
- Pertimbangan daya dukung lingkungan.

Analisis kelayakan ekonomi merupakan salah satu pertimbangan untuk mewujudkan gagasan pengembangan kawasan, karena bagaimanapun manfaat yang akan diperoleh harus bisa menjamin kelangsungan operasional pengembangan kawasan ini. Perlu disadari bahwa manfaat ekonomi bisa dikategorikan dalam manfaat langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam analisis perlu dilakukan identifikasi manfaat secara cermat. Selain itu, kemungkinan peran serta swasta dalam pengembangan kawasan terbuka lebar. Oleh karena itu, profitabilitas menjadi salah satu pertimbangan yang perlu diperhatikan.

Pada segmen akhir perencanaan akan menghasilkan program-program implementasi, sehingga rencana ini dapat dilaksanakan secara realistis dengan memperhatikan berbagai peluang serta kendala yang menyertainya. Satu hal yang penting adalah selalu diacunya tujuan dan sasaran studi sehingga secara konsisten selalu dipakai sebagai landasan perencanaan. Sehingga meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan, namun citra (*image*) atau karakter yang sesuai dengan tujuan pengembangan tetap bisa dijaga.



Tabel 1.1
Tahapan Studi Pengembangan Kawasan Pariwisata Daerah

Persiapan	Survey/Pengumpulan Data		Analisis	Rencana
	Pengenalan Pendahuluan	Obyek Wisata		
Persiapan Dasar - Penyusunan Metodologi - Studi Literatur - Referensi dan Landasan Hukum - Sumber informasi lainnya yang terkait Persiapan Teknis - Penyediaan peta - Data pokok - Daftar informasi data yang dibutuhkan (<i>checklist</i>) Persiapan Personil - Kualifikasi, mobilisasi & jadwal pelaksanaan studi	Pengenalan - Masalah dan potensi utama di Kabupaten Padang Lawas - Inventarisasi obyek wisata di Kabupaten Padang Lawas - Review kajian atau rencana pengembangan pariwisata yang telah ada.	Aspek Alami - Besaran seluruh obyek yang ada - Curah hujan, temperatur udara, topografi, geologi, jenis tanah, vegetasi dan penggunaan lahan Aspek Sosial / Budaya - Kependudukan - PDRB - Sarana & fasilitas yang ada	- Kecenderungan perkembangan - Pengaruh kondisi fisik terhadap perkembangan kepariwisataan Kabupaten Padang Lawas - Perkembangan kependudukan - Penilaian & gambaran aspek geografi, sosial budaya dan aspek tata ruang yang akan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pariwisata daerah - Proyeksi kunjungan wisatawan - Penilaian kebutuhan pengembangan pariwisata daerah - Penilaian kebutuhan terhadap kebijakan daerah tentang pariwisata daerah	- Arah & pembangunan daerah - Permintaan pasar pariwisata daerah - Konsep pengembangan pariwisata daerah - Rencana pengembangan pariwisata daerah - Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata daerah Arah indikasi program tahunan meliputi perwilayahan pembangunan pariwisata daerah dan pengisian kegiatannya

1.6.2. Metode Pengkajian

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dengan rincian sebagai berikut :



1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari penyebaran kuesioner serta wawancara tentang karakteristik obyek wisata kepada para pengelola obyek wisata sebagai responden dan wawancara tentang tentang isu dan pengembangan wisata secara umum terhadap para pelaku usaha pendukung wisata (swasta) serta para pengambil kebijakan, lembaga sosial/kemasyarakatan dan lembaga pendukung pengembangan pariwisata lainnya sebagai narasumber.
2. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang diperoleh dari berbagai sumber atau hasil studi literatur seperti Badan Pusat Statistik, Lembaga Kearsipan, Lembaga Kepustakaan Daerah, Bappeda, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas dan instansi lain yang relevan dengan pengembangan pariwisata. Informasi lainnya diperoleh dari internet, tabloid, majalah serta hasil-hasil penelitian terdahulu tentang kepariwisataan di dalam wilayah atau di luar wilayah Kabupaten Padang Lawas.

2. Pengumpulan Data dan Sampling

Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung (*face to face interview*) kepada responden. Wawancara dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan atau kuesioner. Jenis pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner merupakan pertanyaan non terstruktur (terbuka) dan pertanyaan terstruktur (tertutup). Pertanyaan terstruktur (tertutup) adalah pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi untuk memberi jawaban kepada beberapa alternatif jawaban tertentu. Pertanyaan non terstruktur (terbuka) adalah bentuk pertanyaan yang jawabannya ditentukan oleh responden. Pengumpulan data tentang karakteristik dan pengelolaan obyek dilengkapi dengan observasi terhadap situasi obyek wisata dan pengambilan foto dokumentasi. Dalam pengumpulan data primer ini, satu obyek wisata ditetapkan satu sampel pengelola untuk diwawancarai.

Data umum primer tentang berbagai isu pengembangan dan kebijakan wisata diperoleh melalui wawancara terhadap para narasumber dari berbagai lembaga pemerintah yang relevan dengan pengembangan wisata, lembaga sosial, para pelaku usaha pendukung wisata dan para pengunjung (*consumer*) obyek wisata yang ditentukan menggunakan metode sampling *non probability* yaitu *accidental sampling*.



3. Model Analisa

Data yang diperoleh akan dikompilasi, diklasifikasikan serta ditabulasi sesuai tujuan dari pengkajian. Model analisis data yang akan dipakai tim penyusunan dalam mengkaji kondisi obyek wisata adalah dengan menerapkan/menggunakan dua model analisis yang dipaparkan berikut ini.

a. Analisis SWOT

Untuk mengetahui profil dan sebaran obyek dan atraksi wisata serta pelaku wisata dilakukan dengan teknik survey langsung ke lokasi obyek wisata dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan obyek kemudian dideskripsikan sehingga memudahkan untuk menemukan potensi-potensi dan permasalahan-permasalahan pada masing-masing obyek wisata. Potensi-potensi dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi bagi kepentingan pengelolaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenght*) dan peluang (*Opportunity*) di satu sisi, di sisi lain secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*).

Hasil analisis dengan menggunakan SWOT kemudian akan menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan strategi implementasi pengembangan *pariwisata daerah* termasuk penyiapan material untuk promosi wisata. Strategi ini akan mendasari juga penetapan Daerah Tujuan Wisata (*destination*) berdasarkan cluster obyek wisata, hingga kepada penyajian *site plan* obyek wisata prioritas di setiap *cluster*.

Tabel 1.2
Matriks SWOT

Kategori	Kekuatan	Kelemahan
Peluang	Strategi Kekuatan – Peluang	Strategi Kelemahan – Peluang
Ancaman	Strategi Kekuatan – Ancaman	Strategi Kelemahan – Ancaman



b. Analisis Kriteria Penilaian Obyek Wisata

Berdasarkan literatur, maka pengembangan pariwisata daerah dilakukan dengan cara memaksimalkan daya tarik yang dimiliki oleh obyek wisata. Daya tarik terdiri dari daya tarik alami berdasarkan pada bentuk-bentuk lingkungan alamiah, dan daya tarik budaya didasarkan pada hasil kegiatan manusia. Dengan kata lain faktor-faktor Daya Tarik Wisata terdiri atas :

- Daya Tarik Alami (Pemandangan, Iklim/Cuaca dan lain-lain)
- Daya Tarik Budaya (Tradisi, Budaya, Sejarah, Religi dan lain-lain)
- Daya Tarik Khusus Yang Sengaja Dibuat (Artifisial)
- Fasilitas dan Pelayanan Wisata (Akomodasi, dan lain-lain)
- Aksesibilitas (Sarana/Prasarana Transportasi)

**Tabel 1.3
Faktor Daya Tarik Wisata**

Douglas G. Pearce	Robinson	Robert W.Mc.Intosh	Charles Gearing	M.Petters	Marlotti	Edward L. Inskeep
Bentuk Alamiah	Cuaca Pemandangan	Sumber alam	Alam	Pemandangan	Kenyamanan Alami	Daya Tarik Alami
Kebudayaan	Sejarah & Budaya	Keramah tamahan	Sosial Budaya/ Sejarah	Budaya/Tra- disi	Tata Cara Hidup Masyarakat	Daya Tarik Khusus Artifisial
Buatan Manusia	Hiburan/ Pertunjukan		Olah Raga	Hiburan Daya Tarik Lainnya	Buatan Manusia	Daya Tarik Khusus Artifisial
Fasilitas Penunjang Akomodasi	Fasilitas Buatan Akomodasi	Prasarana/ Suprastruk- tur sarana	Fasilitas Rekreasi Akomodasi			Fasilitas & pelayanan Wisata
Prasarana Transportasi	Aksesibilitas	Transportasi & Kelengkap- annya	Prasarana Jalan, Transporta- -si			Transportasi

Penilaian daya tarik untuk obyek yang dapat dilihat oleh wisatawan meliputi penilaian didasarkan pada daya tarik jenis obyek dan atraksi wisata, aksesibilitas dan fasilitas pelayanan. Kriteria penilaian obyek wisata, dilakukan dengan melakukan pengklasifikasian obyek berdasarkan tingkat kualitas obyek yaitu kualitas tinggi, sedang dan rendah dengan faktor penilaian meliputi :

- Daya tarik yang dapat dilihat;
- Daya tarik yang melibatkan wisatawan;



- Ketersediaan fasilitas;
- Tingkat aksesibilitas, dan
- Faktor penunjang.

Kriteria Penilaian Obyek Wisata dapat dilihat pada **Tabel 1.4** sedangkan Faktor Penilaian Potensi Sumberdaya Pariwisata daerah disajikan pada **Tabel 1.5**.

Tabel 1.4
Kriteria Penilaian Obyek Pariwisata Daerah

No	Kriteria Penilaian	Tinggi (T)	Sedang (S)	Rendah (R)
1.	Daya tarik yang dilihat wisatawan	Banyak yang dilihat, indah, menarik, unik	Sedikit yang dilihat, tidak terlalu indah	Sedikit yang dilihat, tidak indah/biasa saja
2.	Daya tarik yang melibatkan wisatawan	Banyak kegiatan, tingkat keterlibatan tinggi.	Sedikit kegiatan, tingkat keterlibatan tinggi/sedang	Sedikit/tidak ada, tingkat keterlibatan rendah
3.	Ketersediaan fasilitas	Fasilitas dasar dan lainnya, kuantitas dan kualitas memadai	Fasilitas dasar/tertentu, Kuantitas dan kualitas kurang memadai	Fasilitas dasar tidak lengkap/tidak ada, kualitas tidak memadai/terbatas
4.	Tingkat aksesibilitas	Strategis, kondisi jalan baik, ada angkutan umum	Kurang strategis, kondisi jalan baik, ada kualitas kurang memadai	Tidak strategis, kondisi jalan buruk dan atau tanpa angkutan umum
5.	Faktor Penunjang	Dekat dengan banyak obyek terkenal dan atau daya tarik budaya	Sedikit obyek, skala regional, tidak ada daya tarik budaya	Sedikit obyek, skala lokal, tidak ada daya tarik budaya

Tabel 1.5
Faktor Penilaian Potensi Sumberdaya Pariwisata Daerah

Faktor Penilaian	Kelompok Sifat Sumberdaya	Unsur-Unsur Sumberdaya
Jenis atraksi	Alami	Pemandangan
		Keunikan
		Iklm/Cuaca
	Budaya	Tradisi
		Benda budaya
		Legenda/sejarah



	Artifisial	Tradisi		
		Atraksi seni		
		Arsitektur		
		Kegiatan khusus	Perikanan	
			Perkebunan	
		Tanaman Pangan		
Aksesibilitas	Lokal	Strategis		
	Angkutan umum	Rute		
		Trayek		
		Jam operasi		
	Jalan	Jarak	Pusat kota	
			Pusat KPP	
		Kelas		
	Kondisi			
OW – Pusat KPP	Jumlah OW di KPP			
	Pusat KPP > 100 km dari OW			
Fasilitas Pelayanan	Ketersediaan	Umum	Di Obyek Wisata	- Fas min Ruang pengelolaan, WC-air bersih, tempat ibadah, rumah makan, tempat parkir
				- Telepon
			- Listrik	
			- Cenderamata	
		Di KPP terdekat	- Fasilitas minimal Akomodasi, tempat ibadah, rumah makan, kantor pos/telepon, terminal regional	
			- Biro wisata	
		- Tempat pertunjukan		
		- Perbelanjaan		
		Khusus	Pasar buah & bunga Laboratorium Perpustakaan dan lain-lain	

c. Analisis Investasi

Analisis Investasi untuk beberapa obyek yang mendesak atau prioritas akan dikembangkan dilakukan dengan menggunakan Kriteria Investasi yaitu *Net Present Value (NPV)*, *Benefit Cost Ratio (BCR)* dan *Internal Rate of Return (IRR)*. Perhitungan *discount factor* dilakukan atas dasar bunga bank yang berlaku.



1.7. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Padang Lawas, seperti disajikan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab 2 Gambaran Umum Padang Lawas

Bab 3 Review Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan

Bab 4 Analisis Potensi Wisata

Bab 5 Analisis Pasar Pariwisata

Bab 6 Konsep Pembangunan Kepariwisataaan

Bab 7 Strategi Pembangunan Kepariwisataaan

Bab 8 Rencana Induk Pembangunan Pariwisata

Bab 9 Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataaan